

Tantangan APEC di Era Kontemporer dalam Ekonomi Digital dan Menghadapi Pandemi

Achmad Alfaron Alamsyah

alfaronalamsyah@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

DOI: 10.33197/jpi.v1i1.1082

Abstract

The Covid-19 pandemic as a global challenge has made the world economy sluggish, including the Asia Pacific region. APEC as an international organization that focuses on economic development in the Asia Pacific region has an important role in restoring the economy and welfare of the people in the region. In this article, the researcher uses the International Organization theory approach. The method used is a qualitative method with data collection techniques using literature study which is then validated and analyzed using data triangulation techniques. Covid-19 poses a threat to economic trade in the Asia-Pacific region because of the delay in regional trade transportation, so APEC must wisely prioritize human security by reducing tariffs on medical devices barriers for the Asia-Pacific region because health is the most important in creating stability in the system international.

Keywords

APEC, Asia Pacific, Covid-19, International Organization

Corresponding Author

Achmad Alfaron Alamsyah
Jl. Sukakarya II No.17 Kel.
Sukagalih Kec. Sukajadi,
Bandung Jawa Barat, 40163
0818491068

Abstrak

Pandemi Covid-19 sebagai tantangan global yang terjadi membuat perekonomian dunia menjadi lesu, tidak terkecuali kawasan Asia Pasifik. APEC sebagai Organisasi Internasional yang berfokus pada pengembangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik memiliki peran penting dalam memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan pendekatan teori Organisasi Internasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang kemudian divalidasi dan dianalisis dengan teknik triangulasi data. Covid-19 menyebabkan ancaman terhadap perdagangan ekonomi kawasan Asia-Pasifik karena tersendatnya transportasi perdagangan kawasan, sehingga APEC dengan bijaksana harus mengedepankan keamanan manusia dengan cara melakukan penurunan tarif hambatan alat kesehatan untuk kawasan Asia Pasifik karena kesehatan adalah yang paling penting dalam menciptakan stabilitas di dalam sistem internasional.

Pendahuluan

Organisasi Internasional atau OI merupakan salah satu wadah atau pola kerjasama yang dilakukan oleh aktor internasional khususnya negara untuk mencapai kepentingan nasional atau politik luar negeri melalui artikulasi atau pendapatnya. Perlu diketahui bahwa OI yang memiliki peran, fungsi, dan tujuan mempunyai orientasi yang berbeda-beda dalam menjalankan OI. Rudy (1998) menjelaskan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Seperti yang diketahui bahwa OI memang salah satu bagian dari aktor dalam Hubungan Internasional (HI) karena OI jelas memengaruhi sistem internasional dan juga lintas batas wilayah. Dalam perkembangannya, OI pertama kali berdiri bersamaan dengan berkembangnya ilmu HI yaitu berdirinya *League of Nations* atau Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1919

dengan tujuannya yaitu menciptakan kerjasama internasional antar negara-negara anggota dan menciptakan perdamaian abadi. Akan tetapi perkembangan OI telah dicita-citakan atau ruh terbentuknya OI telah dimulai pada masa abad klasik yaitu pada era Thucydides pada masa Yunani Kuno memberikan sketsa atau gambaran tentang perundingan-perundingan, pola kerjasama dan aliansi untuk menciptakan saling ketergantungan dan juga pola saling membantu antara anggota satu sama lain sehingga pada masa itu dibentuk liga Amphitcyonic tetapi perkembangan OI saat itu belum menjadikan ranah isu dalam HI pun belum ada, melainkan masih menjadikan atau sebatas konsep dalam studi keamanan (Archer, 2001:92).

OI barulah di era modern menjadi bagian dalam ranah isu HI dan menjadikan salah satu konsep serta pembentukan OI secara implementatif karena berbagai dinamika sistem internasional dan sifat negara sebagaimana dengan sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan orang lain. Begitupun negara, ketika negara sebagai aktor HI ingin melakukan Politik Luar Negeri di dalam sistem Internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik dalam kepentingan Politik, Keamanan, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan, maka negara pun harus menyadari kapabilitas Politik dalalam negeri dan sumber daya di dalam negaranya. Dengan demikian, maka dibentuklah kerjasama internasional antar negara dengan negara lain (Hadiwinata, 2017:37).

Perlu diketahui bahwa pembentukan OI sendiri tergantung seperti apa tujuan dalam kepentingannya baik dalam politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selain itu, perlu diketahui juga jenis OI sendiri karena OI terbagi ke dalam dua jenis yaitu: *Intergovernmental Organization (IGO)* yang merupakan OI yang terdiri dari aktor anggotanya yaitu negara dan *Non-Governmental Organization (NGO)* yang anggotanya terdiri dari aktor non-negara (Archer, 2001:84). Rudy (1998) membagi OI kedalam dua jenis berdasarkan ‘Tujuan dan luas bidang Kegiatan Organisasi’: OI umum (meliputi kepentingan dalam permasalahan holistik, contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) dan OI khusus (meliputi kepentingan dalam bidang tertentu, contoh : *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* di bidang ekonomi dan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* di bidang keamanan. Terakhir adalah berdasarkan ‘Ruang lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan antara lain :

1. OI (Global-Umum), contoh: PBB
2. OI (Global-Khusus), contoh: *Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *World Health Organization (WHO)*.
3. OI (Regional-Umum), contoh: Uni Eropa (EU), *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, dan Uni Afrika.
4. OI (Regional-Khusus), contoh : *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

Fukuyama (1989) mengatakan sejak perang dingin berakhir dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai pemenang perang dingin, maka sebagaimana dalam tulisan dari Francis Fukuyama ‘*The End of History and The Last Man*’ mengatakan bahwa liberalism merupakan salah satu kemenangan dalam ideologi yang mapan sehingga polar dalam sistem internasional berubah dari bipolar (antara kekuatan kutub AS dan Uni Soviet) menjadi kekuatan multipolar (banyaknya kutub negara-negara lain).

Maka dari itu, munculnya regionalisme baru khususnya di kawasan Asia dan Pasifik yang menjadi satu kesatuan kepentingan kawasan ekonomi menjadi kawasan Asia Pasifik yaitu dengan

berdirinya *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Sebuah Organisasi Internasional yang terkonsentrasi pada kawasan Asia Pasifik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik atau strategi pengumpulan dan analisis data mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik. Lamont (2015) mengatakan metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita, dan dengan demikian mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk politik internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur pada jurnal ilmiah, buku, laporan, media cetak dan publikasi data, dengan penelusuran berbasiskan pada internet yang berkaitan dengan teori Organisasi Internasional dan data mengenai tantangan APEC di era kontemporer dalam ekonomi digital dan menghadapi pandemi Covid-19. Metode triangulasi data digunakan untuk menilai validitas data yang dikumpulkan.

APEC Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional di kawasan Asia Pasifik

Merujuk pada Kementerian Luar Negeri RI (2019) APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) atau disebut Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah OI yang khusus pada bidang ekonomi. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC berdiri sejak tahun 1989 dan pada tahun 1993 diadakan pertemuan pertama yang merupakan rapat Ekonomi Pemimpin APEC. Pertemuan ini berada pada masa kepemimpinan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton setelah melakukan diskusi bersama dengan Perdana Menteri Australia, Paul Keating akan mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota APEC untuk hadir pada pertemuan di Pulau Blake.

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan ekonomi politik antar kawasan Asia Pasifik. Sehingga diperlukan kerja sama intra-regional. Organisasi yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kekhawatiran gagalannya perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay round*) yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Yamazawa, 2000:105).

Hennida (2015) menjelaskan tujuan utama diberdirikannya APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Untuk itu, telah ditetapkan suatu target "*the Bogor Goals*" sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 dengan komitmen sebagai berikut:

"... with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020."

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (2018), mendefinisikan manfaat APEC adalah:

1. Penataan arsitektur (tata aturan) ekonomi dan perdagangan Asia-Pasifik agar tetap dinamis, terbuka (*WTO-consistent*), *resilient*, *inclusive*, *connected*, dan *equitable*.
2. Peningkatan akses pasar melalui liberalisasi sukarela, WTO-consistent dan fleksibel. Contohnya *Bogor Goals* 1994, EG List 2012, dan FTAAP (*Free Trade Area of the Asia Pacific*).
3. Mengupayakan penurunan hambatan non-tarif melalui kerja sama dan harmonisasi peraturan, standar, dan bea cukai.
4. Fasilitasi perdagangan bagi kelancaran arus barang dan jasa, lalu lintas manusia/pebisnis, wisatawan dan pemangku kepentingan lain (*Trade Facilitation Action Plan*).
5. Peningkatan *APEC Connectivity* yang mencakup keterhubungan fisik, kelembagaan dan *people to people* termasuk mengatasi 8 *choke points*, yaitu:
 - Transparansi regulasi dan logistik
 - *Transport infrastructure and physical linkages*
 - *Local/ regional logistic sub-providers*
 - *Clearance of goods at Customs*
 - *Customs documentation and procedures*
 - *Multi modal transport*
 - *Cross border standards and regulations*
 - *Customs transit arrangements*
6. *Capacity building* dan technical assistance bagi pengurangan jarak pembangunan antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang serta kelompok masyarakat maju dan masyarakat berkembang.
7. Memperjuangkan ekspor komoditi andalan Indonesia melalui proposal *Promoting Product which contributes to sustainable and inclusive growth through rural development and poverty alleviation*.
8. Ajang pertemuan antara Pemimpin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri, untuk membahas isu bersama atau isu bilateral termasuk berkoordinasi dengan kalangan dunia usaha.

Dalam APEC, semua ekonomi memiliki suara yang setara dan pengambilan keputusan yang dicapai dengan konsensus. Tidak ada komitmen yang mengikat atau kewajiban perjanjian. Komitmen dilakukan atas dasar sukarela dan proyek pengembangan kapasitas yang membantu anggota menerapkan inisiatif APEC. Teknik pengambilan keputusan secara konsensus ini ditujukan untuk negosiasi agar kesepakatan tercapai. Beberapa organisasi internasional lainnya, para peserta membuat keputusan utamanya dengan pengaturan pemilihan formal seperti suara terbanyak dan suara bulat. Namun baru-baru ini, tampaknya ada kecenderungan peningkatan penggunaan konsensus sebagai pengambilan keputusan dalam praktik internasional. ini disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat internasional yang telah tumbuh lebih beragam dan juga lebih mandiri, dan sebagai hasilnya, aturan suara bulat dan aturan mayoritas menjadi kurang cocok sebagai pengambilan keputusan dalam hubungan internasional saat ini.

Ekonomi digital dan tema “*Optimizing Human Potential For A Future Of Shared Prosperity*”.

Sebagai forum kerja sama regional yang anggotanya merupakan 38 % dari populasi global dan 60 % dari produk domestik bruto global (PDB) APEC berada dalam posisi yang baik

untuk memimpin pekerjaan di bidang-bidang ini, seperti melalui koordinasi kebijakan ekonomi digital, berbagi praktik terbaik dan terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas. Sejak pandemi melumpuhkan perekonomian dunia dan mentransformasikan semua bidang secara digital termasuk laju perekonomian. Contohnya saja kini usaha-usaha ataupun platform di bidang produksi barang gencar mempromosikan melalui online shop. APEC berusaha membahas peluang dan tantangan yang terkait untuk ekonomi digital. Sejak dua dekade lalu, APEC telah mengakui pentingnya ekonomi digital termasuk *e-commerce* dalam menghubungkan ekonomi anggota. Melalui Deklarasi 1998, Pimpinan APEC memuji Cetak Biru APEC untuk Aksi Perdagangan Elektronik yang menetapkan prinsip-prinsip untuk mempromosikan dan mengembangkan *e-commerce* di wilayah tersebut (APEC, 2009).

Di tahun 2020 penyelenggaraan pertemuan APEC dipimpin oleh Malaysia sebagai tuan rumah yang mengusung tema "*Optimizing Human Potential For A Future Of Shared Prosperity*". Di tengah masa pandemi ini APEC bersama negara anggotanya tetap melancarkan apa yang menjadi visi dan misi APEC. Tema pertemuan di tahun 2020 tersebut mengandung makna ajakan bagi anggota APEC untuk fokus kembali pada tujuan fundamental APEC yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia yang merupakan bagian dari anggota APEC memandang bahwa kontribusi APEC sangat dibutuhkan dalam mengatasi ketidakpastian perekonomian dan perdagangan global saat ini. Langkah tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk kemakmuran bersama di masa depan. Program dan kebijakan yang digalakan oleh APEC diharapkan mampu menjadi pilar kestabilan ekonomi dunia dengan berfokus pada kerjasama ekonomi yang adil agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan ekonomi secara merata (Hernando & Andres, 2020: 5).

APEC memperkirakan pandemi COVID-19 ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik menurun. Dalam catatan APEC, angka penurunan ekonomi ini merupakan penurunan yang terdalam yang tercatat sejak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2009. Penurunan pertumbuhan ekonomi membuat kerugian di sektor industri mencapai USD 1,1 triliun. Kemudian diperkirakan juga kenaikan angka pengangguran di tahun 2020. APEC memprediksi pertumbuhan ekonomi akan kembali pulih dan naik atau mengalami *rebound* pada tahun 2021. Guncangan ekonomi global di tengah pandemi ini membutuhkan respons regional yang tepat sasaran dan terkoordinasi terhadap pemulihan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang *balance* antara semua anggota APEC dalam mewujudkan kestabilan sistem perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini (Hernando & Andres, 2020).

Program Kerja dan Upaya APEC dalam mengamankan ekonomi perdagangan kawasan APEC di masa pandemi Covid-19

APEC menyediakan dana untuk lebih dari 100 program setiap tahun. Sekretariat APEC mengelola dua sesi pendanaan proyek per tahun. Program-program APEC didanai dari salah satu dari sejumlah rekening pendanaan program dan dipilih secara kompetitif terhadap kriteria kelayakan dan penilaian yang ditetapkan. Setiap sumber pendanaan proyek APEC dialokasikan ke forum APEC tertentu untuk tujuan kelayakan dan penilaian. Program biasanya meliputi lokakarya, simposium, publikasi, dan penelitian. Mereka terbuka untuk partisipasi dari semua 21 negara anggota APEC. Selain terlibat dengan organisasi sektor publik dan pemerintah dalam

ekonomi anggota, keterlibatan pemangku kepentingan eksternal juga tersedia. Kemudian untuk program APEC Sebagian besar berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan antara anggota dan membangun kapasitas sehingga setiap ekonomi anggota APEC dapat bergerak lebih dekat ke arah perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yaitu meliputi :

1. Mempromosikan dan mempercepat integrasi ekonomi regional
2. Mendorong kerja sama ekonomi dan teknis
3. Meningkatkan keamanan manusia
4. Memfasilitasi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan (Kuriyama, 2020:4).

Di tengah masa pandemi ini APEC juga kerap disibukan dengan serangkain program untuk tetap mengontrol arus perdagangan yang tengah mengalami resesi. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan penyakit ini sebagai Publik Darurat Kesehatan Kepedulian Internasional. Pada 11 Maret, WHO memberi label COVID-19 pandemi, menandakan bahwa penyakit ini cepat menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi banyak ekonomi pada waktu bersamaan. Wilayah APEC menyumbang sekitar 40 % dari total COVID-19 kasus secara global. Krisis ekonomi yang terjadi ditegah pandemi ini mengakibatkan dampak negatif yang terus bertambah. Mulai dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. APEC adalah di antara yang pertama dan terburuk yang terkena dampak pandemi, dan kawasan ini berada di garis depan dalam memenuhi tantangan ini (Kuriyama, 2020:4).

Krisis keparahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika pandemi mengancam membanjiri sistem layanan kesehatan dan ekonomi, ke-21 negara anggota APEC merespons dengan fiskal, moneter, dan makro ekonomi yang masif. langkah-langkah yang ditujukan untuk memperkuat sistem perekonomian sementara pada kondisi saat ini yaitu dengan memberikan dukungan yang ditargetkan dan langsung ke rumah tangga dan bisnis, termasuk UMKM. Otoritas moneter di wilayah APEC juga mendorong upaya pemerintah dengan menerapkan gerakan dalam menurunkan suku bunga acuan dan membangun peningkatan likuiditas fasilitas, termasuk jalur swap dolar untuk memastikan aliran bantuan keuangan yang berkelanjutan dan menopang kepercayaan pasar untuk menjaga pasar keuangan tetap sehat dan stabil (Kuriyama, 2020:5).

Kebijakan perdagangan dapat menjadi alat penting untuk membantu sistem perawatan kesehatan berjuang untuk mengatasi tantangan yang diangkat oleh COVID-19 dan APEC adalah forum yang relevan untuk memperkuat multilateral dan upaya regional di bidang ini. Untuk memperlancar arus barang medis, beberapa pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan keringanan sementara tarif impor pada sejumlah barang medis. Namun, dalam kebanyakan kasus, ini tindakan hanya untuk durasi COVID-19. Untuk memfasilitasi akses ke barang medis kapan saja dan siap untuk bereaksi dalam bentuk apa pun krisis kesehatan masyarakat, APEC bisa bertujuan untuk mengembangkan inisiatif kolektif untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang medis. APEC memiliki rekam jejak untuk memenuhi inisiatif semacam ini. Contohnya, Daftar Barang yang disetujui termasuk komitmen sukarela untuk mengurangi tarif menjadi 5 % atau kurang di 54 lingkungan barang. Komite Perdagangan APEC dan Investasi atau Kelompok

Akses Pasar dapat memimpin upaya di depan ini. Upaya-upaya yang dilakukan APEC dalam mengamankan ekonomi dan hambatan non-tarif pada alat kesehatan antara lain sebagai berikut :

1. Perdagangan global barang-barang medis untuk mendukung perang melawan COVID-19 signifikan, berjumlah hampir 1 triliun dolar AS.
2. Ekonomi APEC menyumbang 40,8 % (404,5 miliar dolar AS) dari nilai impor global barang medis dan 28,8 % (271,8 miliar dolar AS) dari nilai ekspor global.
3. Lebih dari 90 % perdagangan barang medis oleh APEC melibatkan 10 ekonomi APEC.
4. Sebagian besar ekonomi APEC menerapkan tarif *Most-Favoured Nation*(MFN) rendah untuk obat-obatan dan peralatan medis, tetapi mengenakan tarif yang lebih tinggi pada pasokan medis dan produk perlindungan pribadi yang penting untuk mengatasi tantangan COVID-19.
5. Kebijakan perdagangan adalah alat penting untuk memfasilitasi akses ke barang-barang medis untuk mengatasi tantangan yang diangkat oleh COVID-19 dan APEC adalah forum yang relevan untuk memperkuat upaya di bidang ini.
6. Ekonomi APEC dapat mencakup inisiatif kolektif untuk secara permanen mengurangi atau menghilangkan tarif barang medis; berkomitmen untuk menghindari pelaksanaan tindakan pembatasan perdagangan yang tidak perlu, khususnya pembatasan ekspor yang memengaruhi perdagangan barang medis; dan berkomitmen untuk menjaga jalur pasokan tetap terbuka dan fungsional (Kuriyama, 2020:7).

APEC telah berupaya jelas dalam upaya peningkatan ekonomi bebas di kawasan Asia Pasifik dan ekonomi berkelanjutan, terutama pada masa globalisasi ini, revolusi industri perkembangan dan tuntutan zaman menyebabkan APEC harus memodernisasikan diri dengan melakukan program *e-commerce* atau ekonomi digital dan di tahun 2020, pandemi Covid-19 yang mengancam pada keamanan manusia yang mencakup (ekonomi, politik, militer, sosial, dan lingkungan) dalam studi kasus di atas yaitu ancaman terhadap ekonomi dan kesehatan manusia.

Sehingga APEC memprioritaskan dan kerjasama dengan WHO untuk melakukan upaya kebijakan non-tarif pada alat kesehatan meskipun memang tidak semua komponen alat kesehatan tanpa ada hambatan tarif, akan tetapi setidaknya diharapkan bahwa upaya alat kesehatan ini dapat memerangi dan menganggulangi pandemi covid-19 sehingga penyebaran dan jumlah kasus yang terpapar Covid-19 dapat menurun dan ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik membaik dan pulih.

Kesimpulan

APEC adalah salah satu Organisasi Internasional kawasan yang di bidang khusus dalam bidang ekonomi, APEC yang berdiri pada tahun 1989 pada pertemuan multilateral di Canberra, Australia di latar belakang oleh perubahan dinamika sistem internasional yaitu peningkatan liberalisasi perdagangan dan hambatan pada Putaran Uruguay yang menjadi cikal bakal dalam Organisasi Perdagangan Dunia dalam rezim internasional yaitu liberalisasi perdagangan yaitu WHO serta APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan diantaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan ekonomi politik antar kawasan Asia Pasifik. Sehingga diperlukan kerja sama intra-regional.

Dalam pendekatan legal, yaitu dari institusi tubuh OI, APEC merupakan OI karena terdiri dari 21 Negara, kantor pusat di Singapura, landasan hukum berupa *APEC Charter* dari

hasil *Seoul Declaration* pada KTT APEC Seoul 1991 dan dioperasionalkan secara fundamental untuk masa depan APEC pada *bogor goals declaration* pada tahun 1994 yang meliputi peran, tujuan, dan fungsi yaitu menciptakan perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, APEC menggunakan konsep konsensus yang meliputi keseluruhan suara dan tidak mengikat atau *non-binding* dalam kegiatan APEC dan program kerjanya karena bersifat sukarela. Sifat konsensus ini merupakan konstruksi sosial dari masyarakat timur yang menggunakan konsep gotong royong atau kebersamaan, analoginya APEC adalah seperti paguyuban atau karang taruna yang setiap anggotanya dapat memberikan ide atau pendapat tanpa ada nilai-nilai politis melainkan dari kapabilitas ekonomi.

Akan tetapi, dalam tantangan era kontemporer yang dihadapi dengan meningkatnya globalisasi dan revolusi industri 4.0 dan juga bahkan 5.0, menyebabkan peran ekonomi merujuk pada metode digital dalam efisiensi untuk mencapai kemajuan ekonomi bebas di kawasan Asia-Pasifik karena ditambah lagi konsep keamanan manusia yang sudah berkembang, maka itu pun harus merujuk kepada kesejahteraan manusia sehingga APEC menyesuaikan dengan fungsionalismenya meliputi berbagai kegiatan dari KTT APEC yang membahas ekonomi digital pada tahun 2020 untuk kesejahteraan masyarakat Asia-Pasifik ditambah lagi dihadapi pandemi Covid-19 menyebabkan ancaman terhadap perdagangan ekonomi kawasan Asia-Pasifik karena tersendatnya transportasi perdagangan kawasan, sehingga APEC dengan bijaksana harus mengedepankan keamanan manusia dengan cara melakukan penurunan tarif hambatan alat kesehatan untuk kawasan Asia Pasifik karena kesehatan adalah yang paling penting dalam menciptakan stabilitas di dalam sistem internasional.

Referensi

- “APEC Economic Policy Report 2009.” Singapore, 2019.
papers2://publication/uuid/7057E504-6A3F-4E4B-97A7-11FE69DE5533.
- Archer, Clive. *International Organizations*. 3rd ed. London: Routledge, 2001.
- ditjenppi.kemendag.go.id. “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,” 2018. <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi>.
- Fukuyama, Francis. “The end of history?” *The National Interest* 38, no. 3 (1989): 72–79.
<https://doi.org/10.1007/bf02686224>.
- Hadiwinata, Bob S. (Bob Sugeng). *Studi dan teori hubungan internasional : arus utama, alternatif, dan reflektif*. Pertama. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kementerian Luar Negeri RI. “Asia Pacific Economic Cooperation Apec.” 2019. Diakses 14 Mei 2020. https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-apec.
- Kuriyama, Carlos. “Promoting Trade in Medical Goods To Tackle COVID-19 Challenges.” *APEC policy Support Unit Policy Brief*. Singapore, 2020.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*. London: Sage Publications Ltd.
- Rudy, Teuku May. *Administrasi Dan Organisasi Internasional*. Diedit oleh Wilson Drs. Nadeak. Second. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.
- Yamazawa, Ipeei, ed. *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. First. London and New York, 2000.

Acknowledgement

Achmad Alfaron Alamsyah, S.IP adalah mahasiswa pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Periset tertarik pada bidang ekonomi politik global.